

Ekstremisme Di Sahel: Intervensi Uni Eropa Melalui Manajemen Konflik

Denisa Aulia Kintani

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

Email: 2310631260025@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

The Sahel region, encompassing countries such as Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, and Sudan, has been increasingly plagued by violent extremism since 2012. Persistent instability, weak governance, and socio economic challenges have allowed terrorist groups like Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), ISIS in the Sahara, and Boko Haram to expand their influence. This study examines the European Union's (EU) conflict management interventions in addressing extremism in the Sahel. Employing a qualitative research method, the study analyzes EU policies through a library research approach, assessing their effectiveness in mitigating terrorist threats. Findings indicate that while the EU has implemented security, political, and development strategies such as military training missions and economic aid challenges persist due to weak local governance, internal political crises, and external geopolitical rivalries. The study concludes that despite significant efforts, the EU's conflict resolution policies in the Sahel remain constrained by local instability and evolving security threats. Strengthening governance and adapting intervention strategies are crucial for long-term stability.

Keywords: European Union Conflict Management, Extremism in the Sahel, Regional Security and Stability

ABSTRAK

Wilayah Sahel, yang mencakup negara-negara seperti Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Sudan, semakin menghadapi ancaman ekstremisme kekerasan sejak 2012. Ketidakstabilan yang terus berlanjut, lemahnya pemerintahan, serta tantangan sosial ekonomi telah memungkinkan kelompok teroris seperti Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM), ISIS di Sahara, dan Boko Haram untuk memperluas pengaruh mereka. Penelitian ini menganalisis intervensi Uni Eropa (UE) dalam manajemen konflik untuk menangani ekstremisme di Sahel. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan UE dalam meredam ancaman terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UE telah menerapkan berbagai strategi keamanan, politik, dan Pembangunan seperti misi pelatihan militer dan bantuan ekonomi tantangan tetap ada akibat lemahnya pemerintahan lokal, krisis politik internal, dan persaingan geopolitik eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya UE telah signifikan, kebijakan resolusi konflik di Sahel masih terbatas oleh ketidakstabilan lokal dan ancaman keamanan yang terus berkembang. Penguatan tata kelola pemerintahan dan penyesuaian strategi intervensi menjadi langkah krusial untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Kata kunci: Ekstremisme di Sahel, Keamanan dan Stabilitas Regional, Manajemen Konflik Uni Eropa

PENDAHULUAN

Sahel merupakan sebuah wilayah di Afrika yang meliputi beberapa negara seperti Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Sudan. Populasi dan

etnisitas di Sahel ini memiliki keberagaman dari segi budaya, Sejarah, dan juga geografisnya. Namun keberagaman ini malah menjadi sasaran ekstremisme kekerasan sejak 2012.¹ Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara di wilayah Sahel terus menghadapi ancaman yang mengganggu keamanan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi mereka. Banyak negara Afrika di wilayah Sahel kesulitan mengendalikan wilayah geografis mereka akibat konflik yang mengakar dan ketegangan politik internal. Ketidakamanan dan ketidakstabilan ini membuka ruang bagi munculnya terorisme dan ekstremisme kekerasan.

Terorisme telah menjadi faktor utama dalam merombak geopolitik kawasan ini, di mana kelompok ekstremis memanfaatkan agama dan ideologi untuk mencapai tujuan mereka.² Terdapat kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM), ISIS di Sahara, dan Boko Haram, yang memberikan pengaruh negatif dan memanfaatkan kondisi sosial, ekonomi yang buruk serta lemahnya pemerintahan untuk bisa bergerak bebas dan memperluas pengaruh mereka di wilayah ini. Selain itu ketidakpuasan Masyarakat terhadap pemerintah yang sering dianggap korup dan represif juga mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif melalui ideologi ekstrem. Dengan kondisi tersebut, radikalasi terus berkembang di Sahel, diperburuk oleh konflik bersenjata yang semakin mengakar dan sulit dikendalikan.

Perang melawan terorisme di wilayah Sahel pun menjadi isu penting, baik bagi negara-negara setempat maupun masyarakat internasional. Pemerintah serta organisasi regional dan internasional terus berupaya menjaga keamanan dan stabilitas, meskipun tantangan keamanan yang meningkat dan perubahan dinamika geopolitik justru memperkuat peran terorisme dalam mengubah dinamika politik dan ekonomi kawasan. Selain itu, perjuangan melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan di Sahel tak lepas dari persaingan kepentingan kekuatan-kekuatan besar di kawasan tersebut. Setiap negara dan kekuatan besar berupaya mempertahankan pengaruhnya sambil mendefinisikan ulang tujuan geopolitik mereka, baik di Sahel maupun di Afrika secara keseluruhan.³

Hingga saat ini, situasi ekstremisme di wilayah Sahel dan sekitarnya tetap memprihatinkan dengan meningkatnya aksi kekerasan oleh kelompok militer. Di Nigeria, pasukan militer berhasil menewaskan Abba Alai, komandan tertinggi Boko Haram, dalam operasi kontra-pemberontakan di Borno. Namun, Boko Haram masih aktif dan baru-baru ini menyerang tambang emas di Karaga, menewaskan sebelas orang. Selain itu, afiliasi Al-Qaeda bernama JNIM (Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin) melakukan penyergapan di Niger utara, menewaskan sebelas

¹ Sunjo , Emile, and Ndzi Nyadi Francios. 2024. "UNDERSTANDING THE DRIVERS OF VIOLENT EXTREMISM IN THE AFRICAN SAHEL: A HISTORICAL PERSPECTIVE". Journal of Legal Studies, Humanities and Political Sciences (JLSHPS) 11 (3):1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12800069>.

² Kante, Mady Ibrahim. 2025. "Terrorism As a Factor Geopolitical Restructuring in the Sahel Region". Journal of Central and Eastern European African Studies 4 (3-4):20-33. <https://doi.org/10.12700/jceas.2024.4.3-4.274>.

³ *ibid*

tentara. Di Niger barat daya, serangan oleh bandit bersenjata menewaskan 16 orang, sementara kekerasan lintas perbatasan terus meningkat, khususnya di perbatasan Benin dan Niger. Di Mali, tuduhan terhadap tentara nasional dan tentara bayaran Wagner atas pembunuhan warga sipil menambah keruh situasi keamanan. Selain itu, perubahan geopolitik juga terjadi dengan penarikan pasukan Prancis dari Chad dan Pantai Gading, memperkuat tren penurunan kehadiran militer asing di wilayah tersebut. Meningkatnya serangan militan, konflik bersenjata, dan dinamika politik yang tidak stabil menunjukkan bahwa wilayah Sahel masih berada dalam ancaman ekstremisme yang serius.⁴

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap intervensi uni eropa melalui manajemen konflik dalam menangani ekstremisme di Sahel. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas konflik di wilayah ini, studi yang secara khusus menilai dampak kebijakan Uni Eropa terhadap dinamika ekstremisme di sahel masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan kajian yang ada dengan menyoroti sejauh mana intervensi Uni Eropa mampu meredam ancaman kelompok militan di kawasan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Seberapa efektif kebijakan resolusi konflik yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam menangani ekstremisme dan radikal化 di Sahel? Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi strategi keamanan regional yang lebih efektif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam menangani ekstremisme dan radikal化 di Sahel melalui pendekatan resolusi konflik yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang membahas tentang ekstremisme di Sahel dan efektivitas respons Uni Eropa melalui manajemen konflik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu peristiwa atau fenomena.⁵ Secara deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan kejadian atau situasi sosial yang diteliti. Sementara itu, secara analitis, penelitian ini berfokus pada memahami, menafsirkan, dan membandingkan data yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang intervensi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui strategi manajemen konflik. Pengumpulan data yang diambil dengan melakukan studi

⁴ Center for Preventive Action, Violent Extremism in the Sahel, October 23, 2024, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremism-sahel>.

⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896-2910, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>.

kepustakaan (*library research*). yang memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menganalisis berbagai aspek dari kebijakan dan tindakan Uni Eropa dalam merespon ekstremisme di kawasan tersebut dari berbagai sumber jurnal, artikel berita dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti akan berfokus pada beberapa aspek utama, seperti kebijakan Uni Eropa terhadap ekstremisme di Sahel, mekanisme manajemen konflik yang diterapkan, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekstremisme merupakan sebuah masalah rumit yang akhir-akhir ini telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Ekstremisme sering kali dihubungkan dengan tindakan kekerasan, sikap intoleran dan juga cenderung melanggar aturan hukum yang berlaku.⁶ Ekstremisme juga menunjukkan ada pandangan bahwa agama mengalami kemunduran dalam hal keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Penganut paham ini memiliki keyakinan yang berlebihan dan ekstrem, yang sering menjadi alasan utama di balik berbagai tindakan kekerasan, baik di tingkat global, lokal, maupun aksi terorisme.

Ekstremisme muncul tidak hanya karena permasalahan politik, namun juga terlihat dari masalah-masalah sosial, dan ekonomi.⁸ Penelitian empiris menunjukkan bahwa kekerasan akibat paham ekstrem sering kali disebabkan oleh perasaan tidak adil, seperti dikucilkkan dari lingkungan sosial, tidak dilibatkan dalam urusan politik, sulit mendapatkan keadilan atau sumber daya, serta mengalami penindasan atau perlakuan buruk dari pemerintah dan aparat keamanan di negara tersebut.⁹

Seperti halnya yang terjadi di wilayah Sahel yang luas, dan kurang terkelola oleh pemerintah. Daerah ini sering dilanda bencana alam, krisis kemanusiaan, serta kekerasan politik yang diperburuk oleh kondisi cuaca ekstrem dan medan yang sulit. Situasi ini semakin memburuk dengan munculnya kelompok teroris berideologi agama yang memanfaatkan lingkungan tersebut untuk beroperasi.¹⁰ di sahel, beberapa kelompok bersenjata lokal menjalin hubungan dengan kelompok teroris dari Timur Tengah setelah mengadopsi

⁶ Finta Widiarni, Vira Yusputa Fitri, and Masyhuri Masyhuri, "Ekstremisme dan Radikalisme: Penyebab, dan Solusi Berkelanjutan," Indonesian Journal of Education and Development Research 3, no. 1 (2024): 174-183, <https://rayyanjurnal.com/index.php/IJEDR/article/download/4510/pdf>.

⁷ Bibi Suprianto, "Ekstremisme dan Solusi Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Studi Agama 6, no. 1 (2022): 42-55, <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i1.12965>.

⁸ J. B. Heru Prakosa, S. J., "Ekstremisme dan Tantangan Akan Keberagaman," Spiritualitas Ignasian: Jurnal Kerohanian dalam Dunia Pendidikan 18, no. 2 (2017): 21-31, https://repository.usd.ac.id/50399/1/11197_6058-18736-1-SM.pdf.

⁹ United States Institute of Peace, "The Causes and Consequences of Violent Extremism and the Role of Foreign Assistance," United States Institute of Peace, April 12, 2016, <https://www.usip.org/publications/2016/04/causes-and-consequences-violent-extremism-and-role-foreign-assistance>.

¹⁰ Juan Carlos Antúnez, "The Root Causes of Violence in the Sahel," Global Strategy, 2022, <https://global-strategy.org/the-root-causes-of-violence-in-the-sahel/>.

pandangan keagamaan yang radikal. namun ekstremisme yang terjadi di sahel tidak sekedar tentang keagamaan yang radikal, namun juga banyak faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya ketidakstabilan di wilayah ini. Ketidakstabilan ini terjadi karena beberapa faktor.¹¹

1. Politik, ketidakstabilan terjadi karena negara-negara di kawasan tersebut belum memiliki sistem politik yang matang. Sebagian besar dari wilayah Sahel baru merdeka pada tahun 1960-an, sehingga lembaga-lembaga politiknya masih lemah dan sistem pemerintahannya belum stabil. Hal ini disebabkan oleh waktu yang masih terlalu singkat bagi mereka untuk memperkuat diri, mengokohkan pemerintahan, serta mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat
2. Militer, Kurangnya Kontrol yang nyata dari pemerintah serta minimnya kehadiran militer dan polisi di banyak daerah, dan banyak wilayah yang tidak mempunyai otoritas yang kuat, sehingga pihak-pihak nonpemerintah memanfaatkan keadaan ini.
3. Ekonomi, Ekonomi di sahel juga bergantung pada sektor tertentu dan minimnya pengembangan tenaga kerja, serta infrastruktur transportasi dan energi yang belum berkembang. Yang memicu ketidakstabilan, dan inflasi.
4. Sosial, dalam ranah sosial, ketidakstabilan di sahel diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang sayang cepat, arus urbanisasi yang pesat, terjadinya kesenjangan sosial dan etnis serta meningkatnya aksi kekerasan sebagai bentuk protes.
5. infrastruktur, lemahnya infrastruktur membuat akses ke daerah pedesaan menjadi sulit, sehingga menyulitkan pergerakan pasukan militer dan kepolisian dalam menghadapi pergerakan teroris.
6. Informasi, Karena kapasitas pemerintah yang terbatas, ada kekosongan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Karena ketidakstabilan ini, kelompok teroris internasional, seperti Al-Qaeda dan ISIS, telah memperluas pengaruhnya di kawasan ini dengan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan, persaingan antar kelompok, pemerintahan yang lemah, serta wilayah yang terlalu luas untuk dikendalikan dengan baik. Selain itu, perbatasan yang tidak terjaga dengan baik juga memberi mereka peluang untuk bergerak dan berkembang melalui jaringan afiliasi mereka.¹² Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan manajemen konflik menjadi salah satu solusi strategis. Manajemen konflik bertujuan untuk

¹¹ Juan Carlos Antúnez, "The Root Causes of Violence in the Sahel," Global Strategy, 2022, <https://global-strategy.org/the-root-causes-of-violence-in-the-sahel/>.

¹² Méryl Demuynck and Julie Coleman, "The Shifting Sands of the Sahel's Terrorism Landscape," International Centre for Counter-Terrorism, March 12, 2020, <https://icct.nl/publication/shifting-sands-sahels-terrorism-landscape>.

mengendalikan serta menyelesaikan konflik melalui intervensi pihak ketiga, baik dalam bentuk diplomasi, sanksi, ataupun kekuatan militer jika diperlukan.¹³

Dalam konteks Sahel, strategi ini dapat melibatkan empat pendekatan:

1. *Threat-based* (Berbasis Ancaman): Penggunaan kekuatan militer untuk menekan kelompok bersenjata dan teroris agar menghentikan kekerasan.
2. *Deterrence-based* (Berbasis Pencegahan): Kombinasi tekanan diplomatik dan ekonomi untuk menghalangi eskalasi konflik.
3. *Accommodationist* (Berbasis Akomodasi): Upaya diplomasi untuk mendorong kesepakatan damai.
4. *Adjudicatory* (Berbasis Hukum): Penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum internasional.

Intervensi Uni Eropa dalam manajemen konflik di wilayah Sahel

Uni Eropa telah memainkan peran penting dalam manajemen konflik di wilayah Sahel, sebuah kawasan yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas dan keamanan Eropa. Situasi di Sahel semakin memburuk akibat meningkatnya kudeta militer, konflik bersenjata, dan ancaman terorisme dari kelompok-kelompok jihad yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIS. Para menteri Uni Eropa menyatakan keprihatinan besar mereka terhadap meningkatnya jumlah kudeta militer di Afrika.¹⁴ Meningkatnya ketidakstabilan di wilayah ini memicu berbagai permasalahan yang berdampak langsung terhadap keamanan dan kepentingan strategis UE, seperti peningkatan arus migrasi ilegal, ancaman terorisme lintas batas, dan ketidakpastian dalam pasokan energi.¹⁵ Oleh karena itu, UE telah mengadopsi berbagai strategi dan pendekatan guna menanggulangi tantangan yang semakin kompleks ini, dengan menyeimbangkan intervensi keamanan dan militer dengan pendekatan diplomasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah utama yang diambil oleh UE dalam menangani konflik di Sahel adalah dengan menerapkan strategi jangka panjang yang sistematis dan berorientasi pada hasil nyata. Strategi Sahel UE (2011–2020) menjadi dasar utama bagi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kawasan tersebut, dengan fokus utama pada penguatan sektor keamanan, stabilisasi politik, dan pembangunan ekonomi guna menanggulangi ancaman terorisme serta kejahatan terorganisir.¹⁶ Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan di Sahel, UE

¹³ Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," Papua Journal of Diplomacy and International Relations 2, no. 1 (2022): 16-34, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PJDIP/article/view/1945/1790>.

¹⁴ VOA Indonesia, "Pejabat Uni Eropa Tegaskan Solusi Afrika untuk Masalah Afrika," VOA Indonesia, August 31, 2023, <https://www.voaindonesia.com/amp/pejabat-uni-eropa-tegaskan-solusi-afrika-untuk-masalah-afrika/7249707.html>.

¹⁵ Uni Eropa Reporter Koresponden, "AFRIKA: Kemitraan Uni Eropa dengan Negara-Negara #G5Sahel," EU Reporter, February 21, 2018, <https://id.eureporter.co/world/2018/02/21/european-unions-partnership-with-g5sahel-countries/>.

¹⁶ Carlota G. Encina, "Europe, Beyond Its Southern Border," Center for Strategic and International Studies, December 4, 2024, <https://www.csis.org/analysis/europe-beyond-its-southern-border>.

kemudian memperkuat pendekatan ini melalui Rencana Aksi Regional untuk Sahel yang diperkenalkan pada tahun 2015, yang bertujuan untuk memberikan respons lebih cepat terhadap dinamika yang terus berubah di kawasan ini. Selain itu, UE juga menjadi salah satu pendiri Aliansi Sahel pada tahun 2017, sebuah inisiatif yang bertujuan mengoordinasikan bantuan pembangunan internasional guna meningkatkan stabilitas serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi negara-negara di kawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya,¹⁷ UE bekerja sama secara erat dengan negara-negara G5 Sahel—Mali, Niger, Chad, Burkina Faso, dan Mauritania—melalui pendekatan yang mencakup kemitraan politik, dukungan pembangunan, dan intervensi keamanan yang lebih strategis.

Dari sisi politik, UE telah menjalin hubungan kemitraan yang erat dengan negara-negara G5 Sahel dalam rangka meningkatkan koordinasi serta efektivitas dalam menangani berbagai ancaman keamanan dan pembangunan. Melalui berbagai dialog politik yang rutin dengan para pemimpin G5, UE berupaya untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menangani isu-isu seperti konterorisme, migrasi, stabilitas politik, serta pengentasan kemiskinan yang menjadi akar permasalahan konflik di kawasan tersebut.¹⁸ Selain itu, UE turut memainkan peran kunci dalam proses perdamaian di Mali, yang selama bertahun-tahun menghadapi ketidakstabilan politik akibat konflik bersenjata dan intervensi militer. Untuk lebih memperkuat stabilitas regional, UE juga menjadi salah satu pendukung utama dalam pembentukan dan operasionalisasi Pasukan Gabungan G5 Sahel, sebuah aliansi militer yang bertujuan untuk menghadapi ancaman terorisme lintas batas dan memperkuat kapasitas pertahanan di kawasan.

Dalam aspek pembangunan, UE telah mengalokasikan dana besar guna mendukung proyek-proyek yang berfokus pada stabilisasi dan pengentasan kemiskinan di kawasan Sahel.¹⁹ Selama periode 2014-2020, UE bersama dengan negara-negara anggotanya telah mengalokasikan lebih dari €8 miliar untuk mendukung pembangunan di kawasan tersebut, dengan tujuan utama memperkuat infrastruktur sosial, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membangun institusi negara yang lebih tangguh. Dana ini digunakan dalam berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur transportasi, hingga program ketahanan pangan dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terdampak konflik. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam menyalurkan bantuan ini adalah Dana Perwalian Darurat UE untuk Afrika, di mana lebih dari €843 juta telah dialokasikan untuk proyek-proyek yang berfokus pada mengatasi akar

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Uni Eropa Reporter Koresponden, "AFRIKA: Kemitraan Uni Eropa dengan Negara-Negara #G5Sahel," EU Reporter, February 21, 2018, <https://id.eureporter.co/world/2018/02/21/european-unions-partnership-with-g5sahel-countries/>.

¹⁹ *ibid*

penyebab migrasi tidak teratur serta mengurangi risiko radikalasi di komunitas rentan.

Bantuan yang diberikan UE kepada negara-negara G5 Sahel sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik dan kondisi masing-masing negara.²⁰ Sebagai contoh, Burkina Faso menerima dana sebesar €628 juta yang diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan, pertanian, serta ketahanan pangan, mengingat negara ini menghadapi krisis kemanusiaan akibat meningkatnya serangan kelompok bersenjata. Chad, yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan, menerima bantuan lebih dari €542 juta guna memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas institusi negara. Sementara itu, Mali, yang menjadi fokus utama stabilisasi UE, memperoleh dana sebesar €665 juta yang dialokasikan untuk mendukung reformasi negara, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan akses terhadap pendidikan. Niger, yang memiliki peran krusial dalam jalur migrasi dari Afrika ke Eropa, mendapatkan bantuan sebesar €686 juta untuk memperkuat sektor keamanan serta membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang lebih stabil guna mengurangi faktor pendorong migrasi. Selain itu, Mauritania menerima alokasi dana sebesar €160 juta yang digunakan untuk memperkuat pembangunan pedesaan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Selain strategi keamanan dan pembangunan, UE juga mengadopsi konsep keterkaitan antara keamanan dan Pembangunan, yang menekankan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah kunci utama dalam menangani ekstremisme di Sahel.²¹ Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap krisis migrasi pada 2015 dan bertujuan untuk mencegah radikalasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki akses terhadap layanan publik, serta memperkuat institusi negara agar lebih mampu menangani tantangan yang ada. Dalam banyak kasus, kelompok jihad memanfaatkan ketiadaan negara di beberapa wilayah dengan menyediakan layanan sosial dan pendidikan berbasis agama sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, UE berupaya memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah rawan dengan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, guna memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai dan tidak tergantung pada kelompok ekstremis untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai bagian dari inisiatif yang dipelopori oleh Prancis, UE dan negara-negara anggotanya telah meningkatkan investasi mereka dalam sektor layanan publik, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan negara-negara di Sahel.²² Laporan Aliansi Sahel tahun 2021 mencatat bahwa dari total dana yang telah

²⁰ *ibid*

²¹ Carlota G. Encina, "Europe, Beyond Its Southern Border," Center for Strategic and International Studies, December 4, 2024, <https://www.csis.org/analysis/europe-beyond-its-southern-border>.

²² *ibid*

dicairkan sebesar €17 miliar, hampir sepertiganya digunakan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, meningkatkan akses air bersih, membangun infrastruktur jalan, serta memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di kawasan tersebut.²³ Semua upaya ini dirancang untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil dan mencegah penyebaran ekstremisme, dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi di negara-negara Sahel dalam jangka panjang.

Melalui kombinasi strategi keamanan, diplomasi, dan pembangunan, UE berupaya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor global dalam pengelolaan krisis dan stabilisasi kawasan Sahel. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, terutama dengan meningkatnya ketidakstabilan politik serta keterbatasan efektivitas intervensi militer dalam mengatasi ekstremisme. Keberlanjutan keterlibatan UE di Sahel akan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan yang dijalankan serta kemampuannya dalam menyeimbangkan respons militer dengan solusi jangka panjang berbasis pembangunan dan tata kelola yang lebih baik guna menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan ini.

Uni Eropa menerapkan pendekatan manajemen konflik yang komprehensif di wilayah Sahel, mengombinasikan strategi keamanan, diplomasi, dan pembangunan untuk mengurangi eskalasi kekerasan serta mendorong stabilitas jangka panjang. Dalam aspek keamanan, UE menggunakan pendekatan *deterrence-based* dan *threat-based* dengan menggerahkan misi militer dan keamanan seperti Misi Pelatihan UE (EUTM) di Mali dan Misi UE untuk Penguatan Kapasitas Sipil (EUCAP) di Niger dan Mali. Misi-misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pasukan keamanan lokal agar mampu mengatasi ancaman terorisme dan ketidakstabilan secara mandiri. Selain itu, UE juga memberikan dukungan terhadap Pasukan Gabungan G5 Sahel yang berfungsi sebagai aktor keamanan regional dalam menangani kelompok ekstremis bersenjata.

Sementara itu, dalam aspek hukum, Uni Eropa menerapkan pendekatan *adjudicatory*, yakni dengan mendukung supremasi hukum dan reformasi kelembagaan di negara-negara Sahel. Melalui program-program bantuan seperti *European Instrument for Democracy and Human Rights* (EIDHR), UE membantu memperkuat sistem peradilan, mendukung kebebasan sipil, serta melawan impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di wilayah konflik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan mencegah kekerasan berbasis ketidakadilan sosial serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Namun, meskipun Uni Eropa telah mengadopsi berbagai pendekatan manajemen konflik, tantangan yang dihadapi tetap besar. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya komitmen terpercaya (*credible commitment*) dari aktor lokal dalam menjalankan perjanjian damai dan reformasi yang didukung oleh UE. Ketidakpercayaan antar kelompok, dan lemahnya kapasitas negara semakin

²³ *ibid*

memperumit upaya stabilisasi, yang pada akhirnya, tujuan utama dari manajemen konflik yang dilakukan UE di Sahel adalah untuk mengontrol dan membatasi kekerasan yang terjadi, mencegah penyebaran konflik ke wilayah lain, serta mengurangi jumlah aktor yang terlibat dalam konflik.

Analisis keberhasilan dan keterbatasan intervensi Uni Eropa.

Uni Eropa (UE) telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menanggulangi ekstremisme di wilayah Sahel, termasuk reformasi sektor keamanan dan pendanaan proyek pembangunan. Namun, meskipun upaya tersebut, kekerasan di Mali tengah terus meningkat dalam empat tahun terakhir, menunjukkan bahwa pendekatan UE belum sepenuhnya efektif dalam menstabilkan wilayah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas intervensi UE adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mereka sendiri akibat korupsi, nepotisme, dan kegagalan dalam menyediakan layanan publik.²⁴ Meskipun Uni Eropa telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan dan stabilisasi, pendekatan mereka yang berfokus pada penguatan negara tidak selalu diterima oleh warga. Demonstrasi besar di Mali pada 2020, yang menuntut reformasi dan menolak elit politik yang dianggap korup, menunjukkan bahwa banyak warga lebih memilih institusi yang bersih daripada sekadar memperkuat struktur pemerintahan yang ada. Uni Eropa juga enggan menekan pemerintah lokal terkait tata kelola yang baik, karena mereka lebih mengutamakan kerja sama dalam isu kontra-terorisme dan pengendalian migrasi.

Di sisi lain, keterlibatan Uni Eropa dengan masyarakat sipil masih terbatas meskipun kelompok ini memiliki peran besar dalam mendorong perubahan.²⁵ Organisasi masyarakat sipil di Mali dan Niger telah menjadi penggerak utama dalam mengungkap skandal korupsi dan menyuarakan aspirasi publik, tetapi sering kali menghadapi represi dari pemerintah. Uni Eropa telah memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan pelatihan, tetapi belum cukup untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap reformasi politik. Uni Eropa juga telah berupaya menangani ekstremisme di Sahel melalui berbagai inisiatif, termasuk menjadi anggota pendiri Aliansi Sahel pada 2017 dan menerapkan Strategi Sahel Terpadu UE 2021.²⁶ Namun, strategi ini dirancang sebelum berbagai krisis baru muncul, seperti ketidakstabilan politik akibat kudeta berulang, meningkatnya pengaruh Grup Wagner, dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Selain itu, kebijakan UE di Sahel yang bertujuan mengatasi migrasi, mendukung operasi militer Prancis, serta memperkenalkan pendekatan keamanan dan pembangunan

²⁴ Katherine Pye, "The Sahel: Europe's Forever War?" Centre for European Reform, March 31, 2021, <https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2021/sahel-europe-s-forever-war>.

²⁵ Katherine Pye, "The Sahel: Europe's Forever War?" Centre for European Reform, March 31, 2021, <https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2021/sahel-europe-s-forever-war>.

²⁶ VOA Indonesia, "Pejabat Uni Eropa Tegaskan Solusi Afrika untuk Masalah Afrika," VOA Indonesia, August 31, 2023, <https://www.voaindonesia.com/amp/pejabat-uni-eropa-tegaskan-solusi-afrika-untuk-masalah-afrika/7249707.html>.

berbasis Eropa belum sepenuhnya efektif. Pendekatan sepihak Prancis juga memicu ketidakpuasan di antara negara-negara anggota UE, menghambat koordinasi, serta membatasi dampak intervensi. Kudeta berturut-turut di Burkina Faso, Mali, dan Niger semakin memperumit keadaan, yang pada akhirnya mendorong UE untuk tidak memperpanjang mandat Misi Pelatihan Uni Eropa di Mali (EUTM Mali) setelah 18 Mei 2024.

Di satu sisi, UE menghadapi dilema dalam menentukan sikap terhadap pemerintahan yang tidak demokratis mendukung mereka dapat merusak prinsip demokrasi UE, tetapi menghentikan bantuan keamanan membuka peluang bagi aktor lain, seperti Grup Wagner, untuk mengisi kekosongan.²⁷ Dengan kondisi saat ini, UE tampaknya mengalami kebuntuan dalam menstabilkan kawasan, sementara ketidakpuasan terhadap pemerintahan korup terus memicu ketidakstabilan. Meskipun berbagai tantangan menghambat keberhasilan intervensi UE, Sahel tetap menjadi kawasan strategis bagi kepentingan Eropa. Oleh karena itu, UE perlu menyesuaikan pendekatannya dengan situasi yang terus berkembang agar dapat lebih efektif dalam menangani ekstremisme dan memperkuat stabilitas di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Wilayah Sahel terus mengalami ketidakstabilan akibat kombinasi faktor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang kompleks, yang semakin diperburuk oleh kehadiran kelompok teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Boko Haram. Faktor utama yang mendorong ekstremisme di kawasan ini meliputi lemahnya pemerintahan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, konflik bersenjata yang berkepanjangan, serta keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Uni Eropa telah berupaya menangani permasalahan ini melalui strategi yang mencakup intervensi militer, dukungan terhadap pasukan lokal, bantuan ekonomi, serta diplomasi dalam upaya resolusi konflik. Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas karena tantangan internal di negara-negara Sahel, termasuk korupsi, nepotisme, serta persaingan geopolitik dengan aktor lain seperti Grup Wagner. Ketidakmampuan untuk membangun stabilitas yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara efektif menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih adaptif, holistik, dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengatasi ekstremisme dan radikalasi di Sahel bergantung pada sinergi antara keamanan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif guna menciptakan solusi jangka panjang bagi kawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

²⁷ *ibid*

- Antúnez, Juan Carlos. (2022). "The Root Causes of Violence in the Sahel." *Global Strategy*. <https://global-strategy.org/the-root-causes-of-violence-in-the-sahel/>.
- Center for Preventive Action. (2024). *Violent Extremism in the Sahel*. October 23. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremism-sahel>.
- Demuynck, Méryl, and Julie Coleman. (2020). "The Shifting Sands of the Sahel's Terrorism Landscape." *international Centre for Counter-Terrorism*, March 12. <https://icct.nl/publication/shifting-sands-sahels-terrorism-landscape>.
- Encina, Carlota G. (2024). "Europe, Beyond Its Southern Border." *Center for Strategic and International Studies*, December 4. <https://www.csis.org/analysis/europe-beyond-its-southern-border>.
- Kante, Mady Ibrahim. (2025). "Terrorism As a Factor Geopolitical Restructuring in the Sahel Region." *Journal of Central and Eastern European African Studies* 4 (3-4): 20-33. <https://doi.org/10.12700/jceas.2024.4.3-4.274>.
- Prakosa, J. B. Heru, S. J. (2017). "Ekstremisme dan Tantangan Akan Keberagaman." *Spiritualitas Ignasian: jurnal Kerohanian dalam Dunia Pendidikan* 18 (2): 21-31. https://repository.usd.ac.id/50399/1/11197_6058-18736-1-SM.pdf.
- Putri, Penny Kurnia. (2022). "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2 (1): 16-34. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PJDIP/article/view/1945/1790>.
- Pye, Katherine. (2021). "The Sahel: Europe's Forever War?" *Centre for European Reform*, March 31. <https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2021/sahel-europe-s-forever-War>.
- Sunjo, Emile, and Ndzi Nyadi Francios. (2024). "UNDERSTANDING THE DRIVERS OF VIOLENT EXTREMISM IN THE AFRICAN SAHEL: A HISTORICAL PERSPECTIVE." *Journal of Legal Studies, Humanities and Political Sciences (JLSHPS)* 11 (3): 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12800069>.
- Suprianto, Bibi. (2022). "Ekstremisme dan Solusi Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Studi Agama* 6 (1): 42-55. <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i1.12965>.
- Uni Eropa Reporter Koresponden. (2018). "AFRIKA: Kemitraan Uni Eropa dengan Negara-Negara #G5Sahel." *EU Reporter*, February 21. <https://id.eureporter.co/world/2018/02/21/european-unions-partnership-with-g5sahel-countries/>.
- United States Institute of Peace. (2016). "The Causes and Consequences of Violent Extremism and the Role of Foreign Assistance." *United States Institute of Peace*, April 12. <https://www.usip.org/publications/2016/04/causes-and-consequences-violent-extremism-and-role-foreign-assistance>.

- VOA Indonesia. (2023). "Pejabat Uni Eropa Tegaskan Solusi Afrika untuk Masalah Afrika." *VOA Indonesia*, August 31. <https://www.voaindonesia.com/amp/pejabat-uni-eropa-tegaskan-solusi-afrika-untuk-masalah-afrika/7249707.html>.
- Waruwu, Marinu. (2023). "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 2896-2910. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>.
- Widiarni, Finta, Vira Yusputa Fitri, and Masyhuri Masyhuri. (2024). "Ekstremisme dan Radikalisme: Penyebab, dan Solusi Berkelanjutan." *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3 (1): 174-183. <https://rayyanjurnal.com/index.php/IJEDR/article/download/4510/pdf>.